LAMPIRAN

Lampiran 1a. Surat Izin Penelitian Dari Kampus



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR
Jl. Andi Pangerang Pettarani No. 61, Makassar 90222
Telp. (0411) 455949; Fax. (0411) 453438; Email: info@stialanmakassar.ac.id

Nomor : 0464/STIA.3/PPS.02.03 Makassar, 13 Mei 2026
Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
Cq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan
di
Tempat

Dengan hormat disampaikan, bahwa dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu tahapan dalam penyelesaian studi pada Program Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Makassar, maka mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa	:	WAHYU HIDAYAT
No. Pokok	:	S012022017
Program Studi	:	Administrasi Pembangunan Negara
Judul Usulan Skripsi	:	**STRATEGI PENANGGULANGAN KELEBIHAN KAPASITAS DI LAPAS PEREMPUAN KELAS II A SUNGGUMINASA**

Bermaksud mengadakan penelitian di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan. Sehubungan dengan hal dimaksud, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

an. **Direktur Politeknik STIA LAN Makassar**
Ketua Jurusan

Dr. Deasy Mauliana, S.H., M.H
NIP. 19841205 201101 2 017

Tembusan :
1. Direktur Politeknik STIA LAN Makassar

Lampiran 1b. Surat Izin PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

1 of 2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://proptsp.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **34593/S.01/PTSP/2026**
Lampiran : -
Perihal : **Izin penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua Jurusan Politeknik STIA LAN Makassar Nomor : 0464/STIA.3/PPS.02.03 tanggal 13 Mei 2026 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: **WAHYU HIDAYAT**
Nomor Pokok	: S012022017
Program Studi	: Administrasi Pembangunan Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (D4)
Alamat	: Jl. Andi Pangerang Pettarani No. 61, Makassar

dpmptsp
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun KARYA TULIS, dengan judul :

" STRATEGI PENANGGULANGAN KELEBIHAN KAPASITAS DI LAPAS PEREMPUAN KELAS II A SUNGGUMINASA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. ***20 Mei s/d 20 Juni 2026***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami ***menyetujui*** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 19 Mei 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua Jurusan Politeknik STIA LAN Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 1c. Surat Izin Penelitian Kanwil Sulawesi Selatan

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin No. 191A Gunung Sari, Kota Makassar
Pos-el: kanwilditjenpassulsel@gmail.com

Nomor : WP.23-UM.01.01-512 08 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas IIA Sungguminasa
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 34593/S.01/PTSP/2026 tanggal 19 Mei 2026 dan surat Ketua Jurusan Politeknik STIA LAN Makassar Nomor : 0464/STIA.3/PPS.02.03 tanggal 13 Mei 2026 perihal permohonan izin penelitian. Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara untuk memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Wahyu Hidayat
NIM : S012022017
Prodi : Administrasi Pembangunan Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (D4)

Sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul "**Strategi Penanggulangan Kelebihan Kapasitas di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa**" yang akan dilaksanakan pada tanggal 08 s/d 20 Juni 2026 dengan menaati segala ketentuan yang berlaku di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor Wilayah,

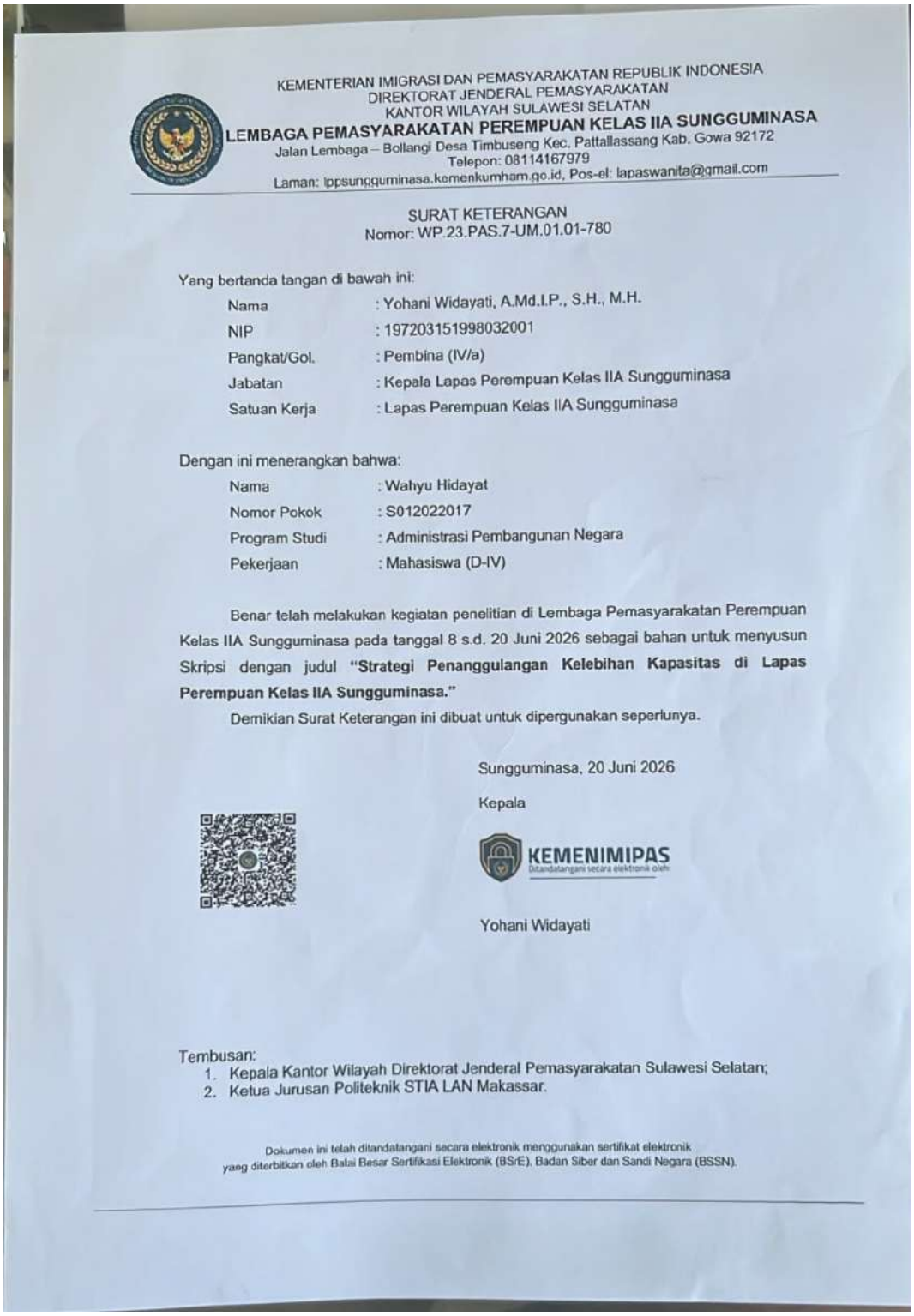
KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

MUT ZAINI

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Ketua Jurusan Politeknik STIA LAN Makassar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 1d. Surat Keterangan Selesai Penelitian



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SUNGGUMINASA
Jalan Lembaga – Bollangi Desa Timbuseng Kec. Pattallassang Kab. Gowa 92172
Telepon: 08114167979
Laman: lppsungguminasa.kemenkumham.go.id, Pos-el: lapaswanita@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: WP.23.PAS.7-UM.01.01-780

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Yohani Widayati, A.Md.I.P., S.H., M.H.
NIP	: 197203151998032001
Pangkat/Gol.	: Pembina (IV/a)
Jabatan	: Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa
Satuan Kerja	: Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Wahyu Hidayat
Nomor Pokok	: S012022017
Program Studi	: Administrasi Pembangunan Negara
Pekerjaan	: Mahasiswa (D-IV)

Benar telah melakukan kegiatan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa pada tanggal 8 s.d. 20 Juni 2026 sebagai bahan untuk menyusun Skripsi dengan judul **"Strategi Penanggulangan Kelebihan Kapasitas di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa."**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungguminasa, 20 Juni 2026

Kepala

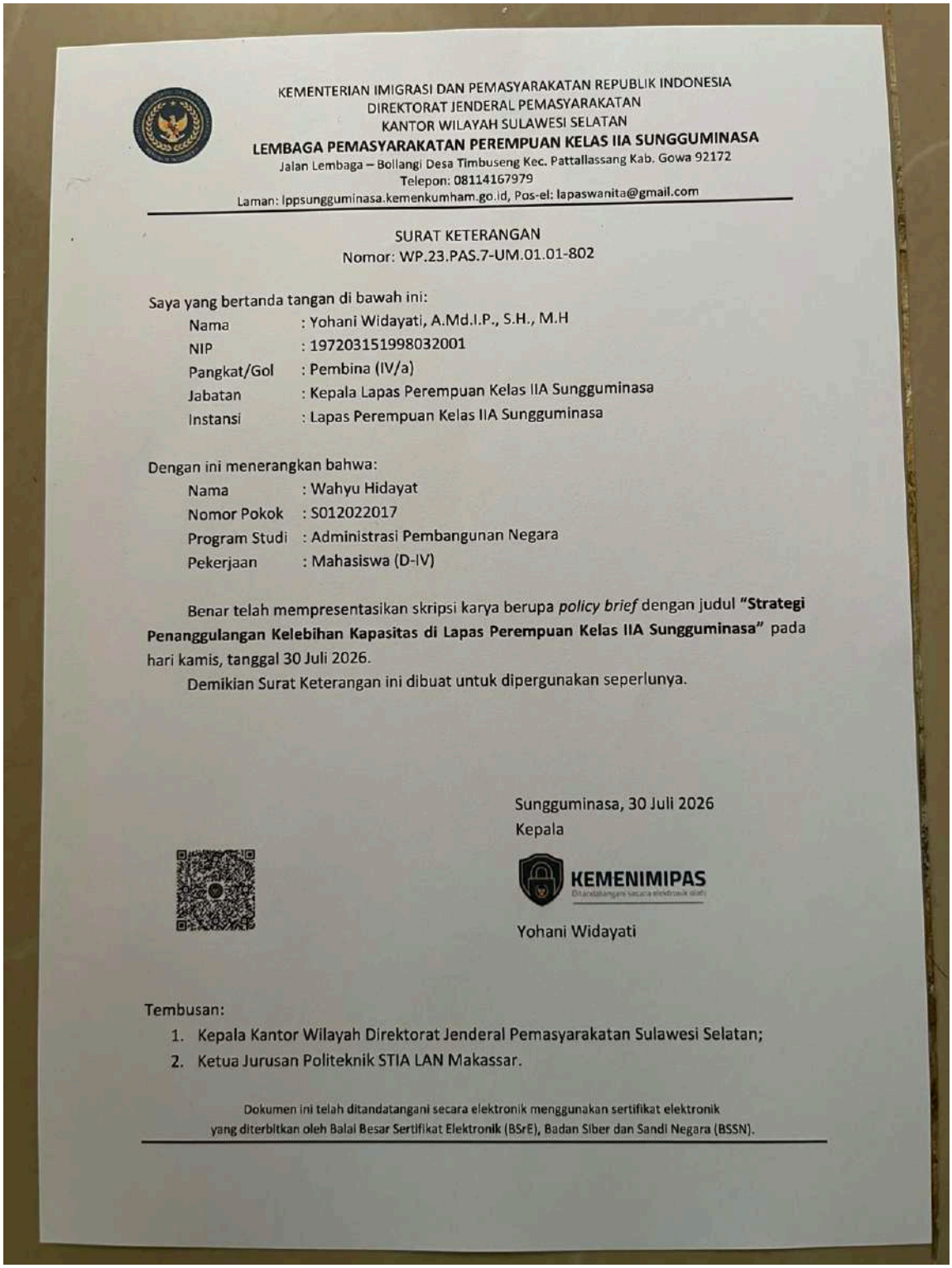
KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Yohani Widayati

Tembusan:
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan;
2. Ketua Jurusan Politeknik STIA LAN Makassar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 1e. Surat Keterangan presentasi skripsi karya



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SUNGGUMINASA
Jalan Lembaga – Bollangi Desa Timbuseng Kec. Pattallassang Kab. Gowa 92172
Telepon: 08114167979
Laman: lppsungguminasa.kemenkumham.go.id, Pos-el: lapaswanita@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: WP.23.PAS.7-UM.01.01-802

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Yohani Widayati, A.Md.I.P., S.H., M.H
NIP	: 197203151998032001
Pangkat/Gol	: Pembina (IV/a)
Jabatan	: Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa
Instansi	: Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Wahyu Hidayat
Nomor Pokok	: S012022017
Program Studi	: Administrasi Pembangunan Negara
Pekerjaan	: Mahasiswa (D-IV)

Benar telah mempresentasikan skripsi karya berupa *policy brief* dengan judul **"Strategi Penanggulangan Kelebihan Kapasitas di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa"** pada hari kamis, tanggal 30 Juli 2026.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungguminasa, 30 Juli 2026
Kepala

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh

Yohani Widayati

Tembusan:
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan;
2. Ketua Jurusan Politeknik STIA LAN Makassar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 2a. Hasil Wawancara Bersama Kalapas

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana kondisi kelebihan kapasitas di lapas perempuan kelas IIA Sungguminasa?	Memang benar terjadi kelebihan kapasitas di sini. Jumlah WBP yang kami tamping melebihi kapasitas hunian yang dapat dapat dilihat pada papan informasi kapasitas yang dapat berubah setiap harinya, bisa lebih meningkat, bisa juga mengalami pengurangan, tapi lebih seringnya mengalami penambahan WBP baru. Karena kelebihan kapasitas, maka pastinya berdampak pada pelaksanaan seluruh kegiatan, baik itu pembinaan, pengawasan, sampai pemberian hak integrasinya. Meskipun begitu, kami tetap berupaya memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku.
Apa penyebab utama terjadinya kelebihan kapasitas di lapas perempuan kelas IIA Sungguminasa?	Penyebab utamanya sudah pasti meningkatnya jumlah narapidana yang masuk, sementara kapasitas hunian tidak mengalami penambahan. Hampir setiap hari ada penambahan narapidana masuk, mayoritas narapidana pindahan yang memiliki masa pidana yang panjang.
Strategi apa yang diterapkan lapas perempuan kelas IIA Sungguminasa dalam penanggulangan kelebihan kapasitas saat ini ?	Hanya ada satu cara yang dapat kita lakukan dalam penanggulangan kelebihan kapasitas, yaitu pemberian hak integrasi, khususnya pembebasan bersyarat. Tapi, dalam pemberian hak tersebut juga ada beberapa tahapan atau SOP yang harus dijalankan oleh WBP.
Bagaimana visi misi dan tujuan lapas perempuan kelas IIA Sungguminasa dalam penanggulangan kelebihan kapasitas?	Lapas tidak memiliki visi dan misi khusus tekait kelebihan kapasitas karena visi misi lapas mengacu pada Ditjenpas. Seluruh program yang kami jalankan, seperti pembinaan, pengusulan hak integrasi, dan peningkatan pelayanan, merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi misi tersebut sekaligus mengurangi dampak kelebihan kapasitas. Begitu juga dengan tujuan utama yakni melaksanakan pembinaan kepada WBP agar dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Pelayanan, pembinaan, dan pemenuhan hak WBP tetap menjadi prioritas sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun dalam keadaan kelebihan kapasitas.
Apa saja program yang dijalankan oleh lapas perempuan kelas IIA dalam penanggulangan kelebihan kapasitas? Apakah program	Program di lapas ada pembinaan kepribadian, kemandirian, pelayanan kesehatan, dan pemberian hak integrasi. Program pembinaan dan pemberian hak integrasi cukup membantu dalam kondisi

tersebut jelas berdampak pada penanggulangan kelebihan kapasitas?	padat seperti ini. Walaupun tidak langsung mengurangi kepadatan setidaknya kondisi keamanan dan ketertiban dapat dikendalikan. Dengan adanya WBP yang keluar melalui pemberian hak integrasi tersebut, jumlah penghuni dapat berkurang secara bertahap. Karena jumlah WBP baru yang masuk juga cukup tinggi, kondisi kelebihan kapasitas masih terjadi
Apakah sumber daya lapas perempuan kelas IIA Sungguminasa terbilang mampu dalam penanggulangan kelebihan kapasitas?	Untuk aspek SDM, kondisi kelebihan kapasitas tentu menambah beban kerja seluruh petugas,bukan hanya pengamanan tetapi juga pembinaan dan pelayanan administrasi. Kami mengoptimalkan SDM yang ada melalui pembagian tugas sesuai fungsi masing-masing serta meningkatkan koordinasi antarbidang agar pelayanan tetap berjalan dengan baik. Untuk anggaran lapas sendiri berasal dari DIPA dan dialokasikan untuk operasional, pembinaan, pelayanan, serta pemenuhan kebutuhan WBP. Dengan kondisi kelebihan kapasitas, kebutuhan tentu meningkat sehingga kami harus mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia. Untuk sarana prasarana lapas memiliki fasilitas yang lengkap, sehingga pembinaan juga berjalan. Tapi memang terbatas penggunannya harus bergantian karena menghindari kepadatan dalam satu ruangan tersebut. Jika dipaksakan, kepadatan akan menimbulkan konflik dan pembinaan disalurkan tidak optimal.
Bagaimana kewenangan lapas perempuan kelas IIA Sungguminasa dalam penanggulangan kelebihan kapasitas? Apakah terdapat SOP sendiri dalam penanggulangan kelebihan kapasitas?	Lapas memiliki kewenangan dalam melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengamanan, serta mengusulkan pemberian hak integrasi kepada WBP yang memenuhi syarat. Untuk Keputusan akhir, khususnya mengenai pemberian PB, asimilasi, maupun kebijakan pemindahan WBP tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dan persetujuan dari instansi yang berwenang, yakni Bapas, Kanwil, hingga Ditjenpas. Pastinya kami memiliki SOP yang mengatur mekanisme penerimaan narapidana baru, pengelolaan hunian, pengamanan, pelayanan Kesehatan, hingga pembinaan WBP. Dalam menghadapi kondisi kelebihan kapasitas, petugas tetap berpedoman pada SOP yang berlaku dengan melakukan penyesuaian teknis, seperti pengaturan ulang

	penempatan kamar hunian dan optimalisasi penggunaan blok yang tersedia. SOP dalam penanggulangan kelebihan kapasitas itu belum ada. Hanya saja Langkah-langkah penanggulangannya mengacu pada SOP pemasyarakatan serta kebijakan Ditjenpas. Koordinasi dengan Kanwil dan UPT lain juga dilakukan apabila diperlukan pemindahan WBP ke lapas yang kapasitasnya masih memungkinkan.
Apakah strategi yang diterapkan sudah efektif ?	Cukup membantu, terutama melalui pemberian hak integrasi. Tapi masih perlu ditingkatkan karena persoalan ini tidak hanya bergantung pada lapas, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan peradilan pidana, dan factor lainnya.

Lampiran 2b. Hasil Wawancara Bersama Kasi Binadik

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana kondisi kelebihan kapasitas di lapas perempuan kelas IIA Sungguminasa?	Kelebihan kapasitas cukup memengaruhi pelaksanaan pembinaan. Jumlah WBP yang banyak menyebabkan pengaturan jadwal kegiatan menjadi lebih padat. Ruang pembinaan juga digunakan secara bergantian sehingga pelaksanaan program harus disesuaikan dengan kondisi lapas.
Apa penyebab utama terjadinya kelebihan kapasitas di lapas perempuan kelas IIA Sungguminasa?	Karena lebih tinggi jumlah narapidana masuk dibandingkan yang keluar. Jadi terjadi penumpukan.
Strategi apa yang diterapkan lapas perempuan kelas IIA Sungguminasa dalam penanggulangan kelebihan kapasitas saat ini ?	Kami mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan serta mempercepat proses administrasi pemberian hak integrasi bagi WBP yang telah memenuhi persyaratan.
Bagaimana proses pemberian hak integrasi kepada WBP?	Kami terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administratif dan substantif. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, usulan diajukan melalui SDP kepada Kanwil dan Ditjenpas untuk diproses lebih lanjut. Itu semua ada SOP nya.
Kendala apa yang sering dihadapi dalam proses pemberian hak integrasi?	Keterlambatan diterimanya Salinan putusan pengadilan, belum lengkapnya dokumen, tidak adanya penjamin keluarga, serta masih adanya yang belum memenuhi syarat substantif, misalnya belum menjalani masa 2/3 masa pidana.
Apakah jumlah petugas pembinaan sudah memadai?	Jumlah petugas masih belum ideal apabila dibandingkan dengan jumlah WBP. Setiap petugas harus menangani beberapa kegiatan sekaligus sehingga diperlukan pembagian tugas yang efektif agar seluruh program tetap berjalan.
Bagaimana koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberian hak integrasi ?	Berkoordinasi dengan Bapas, Kejaksaan, Pengadilan, Kanwil, Ditjenpas, dan lainnya penting agar proses administrasi berjalan lancer dan pelayanan terhadap WBP tidak mengalami hambatan
Apakah strategi yang telah diterapkan sudah efektif ?	Cukup membantu, terutama dalam menjaga keberlangsungan pembinaan walaupun belum maksimal karena masih dipengaruhi beberapa kendala.

Lampiran 2c. Hasil Wawancara Bersama Kasi Giatja

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana kondisi kelebihan kapasitas di lapas perempuan kelas IIA Sungguminasa?	Kelebihan kapasitas cukup memengaruhi pelaksanaan kegiatan kerja karena jumlah WBP yang mengikuti pelatihan jauh lebih banyak dibandingkan kapasitas dan fasilitas yang tersedia. Kami harus mengatur jadwal pelatihan secara bergiliran.
Program kegiatan kerja apa saja yang diberikan kepada WBP?	Ada menjahit, tata boga, pembuatan kerajinan tangan, salon dan tata rias, Perkebunan, peternakan, serta berbagai keterampilan lainnya yang disesuaikan dengan minat dan bakat WBP.
Strategi apa yang diterapkan lapas perempuan kelas IIA Sungguminasa dalam penanggulangan kelebihan kapasitas saat ini ?	Kami mengatur jadwal pelatihan secara bergelombang, mengoptimalkan penggunaan ruang kerja, memanfaatkan seluruh peralatan yang tersedia, serta menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pelatihan keterampilan.
Apakah seluruh WBP dapat mengikuti kegiatan kerja?	Pastinya seluruh WBP diberikan kesempatan mengikuti kegiatan. Hanya saja dilakukan bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan.
Bagaimana kondisi sarana prasarana dalam kegiatan kerja?	Beberapa peralatan sudah tersedia. Hanya saja beberapa peralatan memang butuh ditingkatkan, khususnya ruangan agar tidak lagi dengan skala prioritas.
Apakah kegiatan kerja membantu penanggulangan kelebihan kapasitas ?	Tidak mengurangi jumlah penghuni, tapi membuat WBP lebih produktif, mengurangi kejenuhan, menjaga ketertiban, serta mendukung tujuan pembinaan selama menjalani masa pidana

Lampiran 2d hasil wawancara bersama Ka. KPLP

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana kondisi keamanan di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa ketika terjadi kelebihan kapasitas?	Tentunya kondisi keamanan menjadi lebih menantang. Jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas membuat tingkat pengawasan harus lebih ditingkatkan. Petugas harus bekerja lebih ekstra dibandingkan ketika kondisi lapas masih sesuai kapasitas.
Apa tantangan terbesar dalam menjaga keamanan di tengah kondisi tersebut?	Yang paling berat sebenarnya keseimbangan antara jumlah petugas dengan jumlah warga binaan. Dengan penghuni yang semakin banyak, potensi gangguan keamanan juga meningkat. Karena itu petugas harus lebih sering melakukan kontrol blok, patroli, dan pemantauan aktivitas warga binaan.
Strategi apa yang diterapkan agar keamanan tetap terjaga?	Kami menerapkan pengawasan berlapis sesuai SOP. Setiap pergantian regu dilakukan serah terima kondisi lapangan. Kemudian kami meningkatkan frekuensi kontrol kamar hunian, melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, serta memperkuat komunikasi antarpetugas.
Apakah overkapasitas mempengaruhi pelaksanaan pembinaan?	Secara tidak langsung berpengaruh. Karena ketika penghuni semakin padat, pengaturan jadwal kegiatan menjadi lebih sulit. Tetapi kami tetap berusaha agar kegiatan pembinaan berjalan karena itu bagian penting dari proses pemasyarakatan
Bagaimana koordinasi antara KPLP dengan seksi lain dalam menangani overkapasitas?	Koordinasi dilakukan setiap saat. Kami bekerja sama dengan Binadik, Registrasi, Giatja, maupun Kamtib. Informasi sekecil apa pun mengenai kondisi warga binaan segera kami komunikasikan supaya penanganannya cepat dan tidak berkembang menjadi gangguan keamanan.
Menurut Ibu, apa solusi jangka panjang dalam mengatasi kelebihan kapasitas?	Kalau dari sisi pengamanan, tentu kami berharap jumlah penghuni bisa dikurangi melalui optimalisasi pemberian hak integrasi seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat sesuai ketentuan. Selain itu penambahan personel pengamanan dan peningkatan fasilitas juga sangat diperlukan agar keamanan tetap terjaga meskipun jumlah penghuni terus bertambah.

Lampiran 2e hasil wawancara bersama Kasubag TU

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana kondisi kelebihan kapasitas mempengaruhi pengelolaan administrasi di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa?	Kalau berbicara administrasi, tentu sangat berpengaruh. Semakin banyak warga binaan berarti semakin banyak juga dokumen yang harus kami kelola. Mulai dari administrasi registrasi, surat-menyurat, pelayanan hak warga binaan sampai kebutuhan administrasi internal pegawai juga meningkat. Jadi volume pekerjaan bertambah cukup signifikan.
Apa kendala terbesar yang Ibu rasakan dalam kondisi tersebut?	Yang paling terasa itu jumlah pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang tersedia. Kadang dalam satu hari ada banyak berkas yang harus segera diselesaikan, sementara pegawainya tetap. Jadi kami harus mengatur prioritas pekerjaan supaya pelayanan tetap berjalan.
Bagaimana strategi yang dilakukan agar pelayanan administrasi tetap berjalan optimal?	Kami berusaha memaksimalkan pembagian tugas kepada masing-masing pegawai sesuai tupoksinya. Selain itu kami memanfaatkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) agar proses administrasi lebih cepat dan data lebih mudah diakses. Walaupun kadang masih terkendala jaringan atau kelengkapan dokumen dari instansi lain.
Apakah koordinasi dengan instansi lain berpengaruh terhadap penanganan kelebihan kapasitas?	Sangat berpengaruh. Misalnya dalam pengurusan pembebasan bersyarat atau administrasi lainnya, kami harus berkoordinasi dengan kejaksaan, pengadilan maupun Balai Pemasyarakatan. Kalau ada dokumen yang terlambat dikirim, otomatis prosesnya juga ikut terlambat sehingga warga binaan yang sebenarnya sudah memenuhi syarat belum bisa segera keluar.
Menurut Ibu, apa yang perlu ditingkatkan agar strategi penanggulangan kelebihan kapasitas lebih efektif?	Kalau menurut saya perlu penambahan SDM administrasi, peningkatan kualitas sistem informasi, serta koordinasi yang lebih cepat antarinstansi. Kalau administrasi berjalan lancar maka proses pemberian hak warga binaan juga lebih cepat sehingga dapat membantu mengurangi jumlah penghuni.

Lampiran 2f hasil wawancara bersama Kasisubseksi registrasi

Pertanyaan	Jawaban
Apakah ada program yang telah dijalankan dalam mengatasi kelebihan kapasitas pada lapas ini ?	Betul adek jadi disini itu sudah ada program yang dijalankan sesuai dengan perintah dan berdasarkan peraturan yang sudah ada seperti UU no 22 Tahun 2022 yang lebih spesifik membahas terkait dengan grand design. Salah satu programnya yaitu pemberian remisi dan hak hak integrasi WBP.
Apakah ada kendala dalam menjalankan program ini ?	Iya tetap ada dan kami ini mengusahakan semaksimal mungkin kendala tersebut dapat diatasi secara cepat dalam pemenuhan hak hak WBP, kendala yang sering dialami seperti surat hasil putusan dari kejaksaan, tidak adanya penjamin dari pihak WBP, selebihnya itu biasanya perihal administratif. Karena kami disini cumin melakukan verifikasi berkas serta pengusulan dan tahapan akhirnya itu ada di Bapas, Kanwil, dan Ditjenpas.
Apakah ada data WBP yang mendapatkan remisi, PB ataupun hak hak integrasi lainnya ?	Pada bulan juni, ada beberapa WBP yang kami usulkan ke dalam sidang TPP dalam pemberian hak hak integrasinya, namun hanya 6 WBP yang di acc, 10 sisanya itu masih memiliki kekurangan dalam persyaratannya.
Apakah program ini berjalan efektIf dalam mengurangi kelebihan kapasitas ?	Pastinya karena setiap WBP yang telah lulus menerima PB dan hak integrasi lainnya dapat bebas dari lapas, hal tersebut mengurangi jumlah penghuni lapas dalam menangani kelebihan kapasitas.

Lampiran 2g hasil wawancara bersama Kamtib

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana kondisi kelebihan kapasitas yang terjadi di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa saat ini?	Kondisi kelebihan kapasitas memang menjadi tantangan bagi kami. Jumlah warga binaan yang ada saat ini sudah melebihi daya tampung yang tersedia. Karena lapas ini menjadi tempat penempatan narapidana perempuan dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, maka jumlah penghuni terus bertambah. Dampaknya tentu berpengaruh terhadap pengamanan dan pengawasan sehari-hari.
Apa dampak kelebihan kapasitas terhadap bidang keamanan dan ketertiban?	Ketika jumlah penghuni bertambah, tingkat pengawasan juga harus lebih ditingkatkan. Petugas harus bekerja lebih ekstra karena potensi gangguan keamanan bisa meningkat. Misalnya perselisihan antar warga binaan, penggunaan fasilitas yang harus bergantian, sampai pengawasan kamar hunian yang lebih padat dari kapasitas normal.
Bagaimana strategi yang dilakukan untuk menjaga keamanan dalam kondisi tersebut?	Kami melakukan penguatan pengawasan melalui kontrol rutin pada blok hunian, apel penghuni, patroli petugas, serta koordinasi dengan bagian lain. Selain itu kami juga mengoptimalkan pendekatan persuasif kepada warga binaan agar setiap permasalahan dapat diselesaikan lebih awal sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan.
Apakah jumlah petugas saat ini sudah memadai?	Kalau dibandingkan dengan jumlah warga binaan yang ada, tentu masih perlu penambahan petugas. Namun kami berupaya memaksimalkan sumber daya yang ada melalui pembagian tugas dan jadwal pengamanan yang efektif.
Menurut Bapak/Ibu, apa langkah yang perlu diperkuat untuk mengurangi dampak overkapasitas?	Optimalisasi program integrasi seperti pembebasan bersyarat, asimilasi, dan remisi perlu terus ditingkatkan. Selain itu penambahan sarana dan prasarana serta dukungan SDM juga penting agar pengelolaan lapas dapat berjalan lebih optimal.

Lampiran 2h hasil wawancara bersama WBP 1

Pertanyaan kepada WBP 1	Jawaban
Bagaimana pendapat Ibu mengenai kondisi hunian di lapas saat ini?	Memang penghuni di sini cukup banyak dibandingkan kapasitas kamar. Dalam satu kamar jumlah penghuninya lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga ruang gerak menjadi lebih terbatas.
Apakah kondisi tersebut mempengaruhi aktivitas sehari-hari?	Iya, kadang harus bergantian menggunakan fasilitas yang tersedia. Tetapi petugas tetap berusaha mengatur agar semuanya bisa berjalan dengan baik.
Bagaimana pelayanan dan pembinaan yang diberikan oleh lapas?	Menurut saya program pembinaan tetap berjalan. Kami masih mengikuti kegiatan keagamaan, keterampilan, dan kegiatan lainnya. Walaupun jumlah penghuni banyak, petugas tetap berusaha memberikan pelayanan.
Apakah pernah terjadi konflik akibat kepadatan penghuni?	Kadang ada perbedaan pendapat atau kesalahpahaman antar penghuni, tetapi biasanya segera diselesaikan oleh petugas. Sampai sekarang kondisi masih bisa dikendalikan.
Apa harapan Ibu terhadap kondisi lapas ke depan?	Harapannya jumlah penghuni bisa berkurang sehingga kamar menjadi lebih nyaman dan kegiatan pembinaan bisa lebih maksimal.

Lampiran 2i hasil wawancara bersama WBP 2

Pertanyaan kepada WBP 2	Jawaban
Bagaimana Ibu merasakan dampak kelebihan kapasitas di lapas ini?	Yang paling terasa adalah kondisi kamar yang cukup padat. Kami harus saling menyesuaikan dan menjaga toleransi agar tetap nyaman tinggal bersama..
Apakah kelebihan kapasitas mempengaruhi kesehatan atau kenyamanan penghuni?	Kadang memang terasa lebih sesak dibandingkan kondisi ideal, tetapi petugas tetap melakukan pemeriksaan kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan lapas.
Bagaimana pelaksanaan program pembinaan selama Ibu menjalani masa pidana?	Program pembinaan tetap berjalan. Kami mengikuti pelatihan keterampilan, kegiatan kerohanian, dan berbagai kegiatan lainnya yang cukup membantu untuk mengisi waktu dan menambah kemampuan..
Bagaimana hubungan antara warga binaan dan petugas?	Petugas cukup terbuka ketika ada keluhan atau masalah. Kalau ada kendala biasanya bisa disampaikan dan dicari solusinya bersama.
Apa yang menurut Ibu perlu diperbaiki dalam penanganan kelebihan kapasitas?	Mungkin perlu penambahan fasilitas dan pengurangan jumlah penghuni melalui program yang memang menjadi hak warga binaan yang sudah memenuhi syarat. Dengan begitu kondisi lapas bisa lebih nyaman bagi semua pihak.

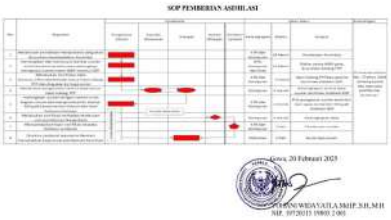
Lampiran 3a SOP Pemberian Pembebasan Bersyarat





Lampiran 3b SOP Pemberian Asimilasi





Lampiran 3c SOP Program pelaksanaan pelatihan dan bimbingan kerja



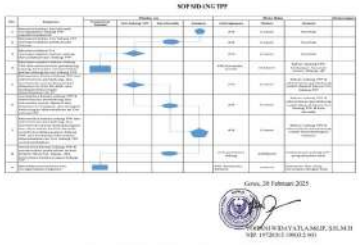


SOP PROGRAM PELAKSANAAN PELATIHAN DAN BIMBINGAN KERJA

Gowa, 20 Februari 2025

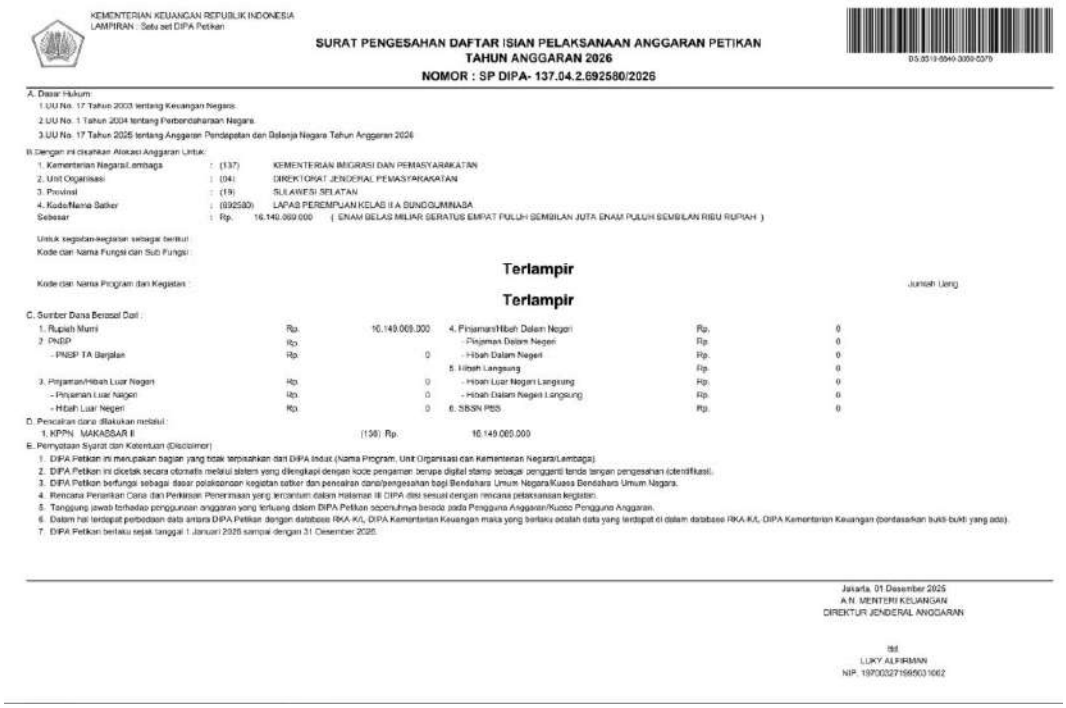
Lampiran 3d SOP Sidang TPP





SOP SIDANG TPP

Lampiran 3e Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran 2026



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 137.04.2.692580/2026

A. Dasar Hukum :
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk :

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(137)	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
2. Unit Organisasi	:	(04)	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
3. Provinsi	:	(19)	SULAWESI SELATAN
4. Kode/Nama Satker	:	(692580)	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A SUNGGUMINASA
Sebesar	:	Rp. 16.140.069.000	(ENAM BELAS MILIAR SERATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi	Kode dan Nama Program dan Kegiatan	Jumlah Uang
Terlampir	**Terlampir**	

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	16.140.069.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MAKASSAR II	(136) Rp.	16.140.069.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA dibi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L, DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd

LUKY ALFIRMAN
NIP. 197002271995031002

Lampiran 4 Dokumentasi sarana dan prasarana serta pembinaan











Lampiran 5 Dokumentasi wawancara bersama informan

















Lampiran 6 Dokumentasi Penyerahan



Lampiran 7 Riwayat Hidup Peneliti

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Wahyu Hidayat, lahir di Makassar pada tanggal 5 Oktober 2002. Peneliti merupakan anak ke-2 dari 2 bersaudara, pasangan Nurdin Kadir dan Muliati. Peneliti menyelesaikan Pendidikan dasar di SD Inpres Unggulan BTN Pemda pada tahun 2015, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 2 Makassar dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti menempuh Pendidikan di SMA Kartika XX-I Makassar dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2022, peneliti diterima sebagai mahasiswa Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Makassar. Selama menempuh Pendidikan di perguruan tinggi, peneliti aktif mengikuti kegiatan akademik maupun nonakademik. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S.Tr.AP, peneliti menyusun skripsi yang berjudul "Strategi Penanggulangan Kelebihan Kapasitas Di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.